

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK MORO DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Bab ini menjelaskan tentang dinamika konflik Moro dan upaya penyelesaian dari negara lain serta Indonesia. Pemaparan tersebut penting karena merupakan pengantar awal sebelum menjelaskan alasan peran Indonesia pada bab selanjutnya. Pemaparan pada bab ini penulis bagi dalam tiga sub bab; sub bab pertama menjelaskan tentang dinamika konflik Moro, dan sub bab kedua menjelaskan tentang upaya penyelesaian dari negara lain dan organisasi internasional.

#### **2.1 Dinamika Konflik Moro di Filipina**

Filipina mempunyai banyak penduduk yang memiliki berbagai macam kelompok, bangsa, dan agama. Salah satunya adalah masyarakat Filipina yang menganut agama Islam. Menurut hasil laporan dari *United State Institute of Peace* pada Januari 2005, bahwa penduduk yang beragama Islam di Filipina ada 5%, atau sekitar 4 juta penduduk, dari penduduk Filipina yang jumlahnya 82 juta yang secara geografis berada di pulau Mindanao dan Sulu, Filipina selatan, dimana merupakan sekitar 20% dari penduduk wilayah yang kurang lebih dari 16 juta.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> United State Institute of Peace, Januari 2005, *The Mindanao Peace Talks: Another to Resolve the Moro Conflict in the Philippines*, Special Report: Washington, DC 20036, hal. 3. Diakses dari <http://www.usip.org/sites/default/files/sr131.pdf> (30/04/2017, 13.35).

### 2.1.1 Masa Kolonial Spanyol

Orang-orang Spanyol menyebut umat Muslim di Filipina dengan sebutan “Moro” karena terbiasa menyebut umat Muslim di Afrika Utara<sup>41</sup> dengan istilah “Morocco”, sehingga kemudian menjadi sebutan umum bagi umat Muslim di Maghrib (barat) maupun di Masyriq (timur). Kata Moro yang artinya Muslim merupakan sebutan dari komunitas Kristiani di Filipina Selatan dan Utara. Oleh sebab itu, pulau yang ada di Filipina Selatan disebut dengan Moroland yang berarti Bumi Umat Muslim.<sup>42</sup>

Awal mula konflik Moro terjadi karena adanya pembagian lahan yang membuat penduduk tidak adil terhadap pembagian. Seperti lahan yang masih berpenghuni oleh penduduk yang beragama Islam berubah menjadi lahan umum tanpa memperdulikan penghuni sebelumnya oleh pemerintah Filipina.<sup>43</sup> Pembagian lahan untuk penduduk yang beragama Islam tidak seimbang dengan penduduk Kristiani.

Konflik Moro yang terjadi di Filipina merupakan konflik penduduk yang beragama Islam terkait masalah kemanusiaan dan keadilan. Pada sejarahnya, sebelum datangnya orang-orang penjajah Spanyol keadaan internal di Filipina tergolong aman,

---

<sup>41</sup> Setelah kekuasaan Bani Ahmar—Kerajaan Islam terakhir di Spanyol (Andalusia—runtuh), raja dan keluarganya lari ke Afrika Utara, tepat nya di wilayah Maroko sekarang, dan menjadi pengembala kambing. Ratu Isabella dan penduduk Muslim dengan sebutan *al-Magharibah* (enduduk Maghrib) atau *al-Masyariqah* (penduduk Masyriq).

<sup>42</sup> Muhammad Asad Shahab, 2017, *Moro* (Terj. *Jawlah fi Rubu'i Juzur Muru*), Indonesia: PT. Zaytuna Ufuk Abadi, hal. 10-11.

<sup>43</sup> Aunur Rofiq MS, 2017, *Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front*, *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, Diponegoro: Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, hal. 66.

dan Islam telah menginjakkan kakinya di Filipina terutama di Mindanao.<sup>44</sup> Namun, Filipina memiliki kriminalitas tinggi yang berhubungan dengan pemikiran radikal di kawasan Asia Tenggara, maka dari itu terdapat kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran tersebut merasa tidak adil karena wilayah otonom Islam di Filipina semakin dikucilkan. Para penduduk Muslim menginginkan kehidupan yang lebih baik, dimana sebuah kehidupan yang memiliki kebebasan menjalankan agama dan menikmati hak-haknya, mereka menuntut hak-hak mereka yang telah dirampas namun yang mereka dapat bahkan penghancuran, pembantaian dengan senjata-senjata pemusnah seperti artileri, roket, dan bom.<sup>45</sup>

### **2.1.2 Masa Kolonial Amerika Serikat**

Tahun 1905, *Public Land Act* (Keputusan Lahan Umum) yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dimana pada saat itu AS yang memerintah di Filipina, menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terdaftar dianggap sebagai lahan untuk umum dengan tidak memperhatikan penghuni sebelumnya.<sup>46</sup> Adanya perubahan kepemilikan lahan yang sebelumnya memiliki penghuni atau pribadi namun menjadi kepemilikan bersama atau umum. Sehingga pada tahun 1919, *Amendment to Pubic Land Act* (Amandemen Keputusan Lahan Umum), mengizinkan masyarakat yang menganut agama Kristian untuk mendapatkan rumah lebih dari 24

---

<sup>44</sup> Alghi Mustika Luthfi, 2017, *Peran Indonesia di Era Soeharto dalam Proses Penyelesaian Konflik Mindanao: Studi Kasus Pasca Jeddah Accord*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 13.

<sup>45</sup> Muhammad Asad Shahad, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>46</sup> Lisa Huang, Victor Musembi and Ljiljana Petronic, June 21, 2012, *The State-Moro Conflict in The Philipines*, INAF 5439, hal. 7-8. Diakses dari <http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1392.pdf> (30/04/2017, 15.07).

hektar namun masyarakat yang non-Kristiani hanya mendapatkan 4 hektar.<sup>47</sup> Adanya ketidakseimbangan dalam pembagian dikarenakan penjajah yang datang ke Filipina yang sebagian besar adalah Kristiani.

Hasil wawancara Muhammad Asad Sahab<sup>48</sup> dalam sebuah pengantar di buku yang Asad tulis, dimana Asad sambil berbincang dengan seorang kristiani bernama Fernandus yang lahir di wilayah Selatan yakni salah satu pemandu yang setia menemani perjalanan Asad sejak tiba di Manila, “Kenapa para pejabat pemerintah Filipina merasa khawatir dengan umat Muslim yang lembut itu?” Pertanyaan tersebut yang terlontar ketika mereka dalam perjalanan dari Manila ke kepulauan Moro.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Fernandus bahwa pemerintah Filipina mempraktikkan kebijakan warisan dari bangsa Spanyol dengan ketat sejak para pejuang tersebut menginjakkan kaki di kepulauan Moro dalam memerangi dan menjajah penduduk Muslim, dimana para pejuang memerangi para leluhur penduduk Muslim sementara mereka memerangi anak cucu penduduk Muslim, kemudian penduduk Muslim senantiasa mengingat berbagai pembantaian dan penderitaan yang dialami oleh penduduk Muslim di kepulauan Moro secara berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, penduduk Muslim di Moro mengangkat senjata dan berperang untuk memperjuangkan hak-hak hidup penduduk Muslim, dan tidak akan pernah melupakan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>48</sup> Penulis adalah seorang anak Bangsa Indonesia yang berada di Luar Negeri, yang berjuang memperkenalkan Indonesia melalui puluhan buku dan tulisan-tulisannya di berbagai media massa di Timur Tengah. Sebagai penulis peduli dengan kehidupan Muslim dunia, konflik Moro tentu tidak luput dari perhatiannya.

berbagai pertumpahan darah dan keluarnya para pejuang dari pulau Sulu yang menghabiskan seluruh pendapatan negara selama setahun.<sup>49</sup>

Penduduk yang menganut agama Islam pada saat itu tidak tinggal diam, mereka memerangi orang-orang Spanyol karena mereka memiliki mental dan tekad yang sangat besar, namun tetap saja mereka selalu berdamai dengan orang yang berdamai dengan mereka. Pada pembicaraan tersebut bahwa Islam sudah terlekat erat dengan masyarakat Moro, sehingga apa yang dikenal dengan kata-kata Islam di Filipina ialah Moro.

### **2.1.3 Kelompok-Kelompok di Moro**

Konflik Moro terjadi antara *the Government of the Republic the Philippines* (GRP) dengan beberapa kelompok yang terbentuk dikarenakan adanya pemberontakan yakni *Moro Independent Movement* (MIM), *Moro National Liberation Front* (MNLF), *Bangsamoro Liberation Organization* (BMLO), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), *Islamic Command Council* (ICC), dan Abu Sayyaf.

Pembahasan tentang Moro terus diperbincangkan, bicara tentang Moro maka bicara dengan tokoh pendiri MNLF. Nur Misuari adalah sosok pejuang yang diberi bantuan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah Indonesia, Malaysia dan negara-negara yang rakyatnya disandera oleh Abu Sayyaf dalam upaya pembebasan sandera dan diplomasi dengan Abu Sayyaf.<sup>50</sup> Secara umum Moro memiliki banyak gerakan Islam dan tidak tunggal, terbukti bahwa MNLF yang

---

<sup>49</sup> Wawancara diambil dari buku Muhammad Asad Shahab, *Op., Cit.*, hal. 12.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 20.

didirikan oleh Nur Misuari berbeda dengan gerakan yang didirikan Abu Sayyaf. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan Moro karena yang diteliti Moro secara keseluruhan tidak berkelompok yang terbagi seperti MNLF, MILF ataupun kelompok Islam garis keras.

Kelompok yang pertama terbentuk di Moro ialah MIM dibentuk pada tahun 1968 dipimpin oleh Utdog Matalam.<sup>51</sup> Organisasi ini memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Filipina dan mendirikan negara Islam karena partai dari pihak islam tidak mendapatkan hak dalam pemerintahan. Selanjutnya, MNLF yang berdiri pada tahun 1969 dan MILF ada di tahun 1984.<sup>52</sup> Kedua kelompok ini mempunyai pemimpin yang berbeda, MNLF dipimpin oleh Nur Misuari sedangkan MILF dipimpin oleh Salamat Hakim. MNLF dan MILF terbagi karena Nur Misuari dianggap tidak mampu menyampaikan aspirasi mayoritas Muslim Moro yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah Manila tanpa menyelesaikan prinsipil bagi Bangsa Moro. MILF bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan Moro<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Chapter 7: *Muslim Separatism and the Bangsamoro Rebellion*, UC Press E-Book Collection. University of California Press, diakses dalam <http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft0199n64c&chunk.id=d0e2169&toc.depth=1&brand=ucpress> (19/09/2017, 12.05), hal. 144-145.

<sup>52</sup> Rizal G. Buendia, *The State-Moro Armed Conflict in the Philippines*, Unresolved National Question or Question of Governance, diakses dari [https://eprints.soas.ac.uk/4362/1/AJPS13-state\\_moro\\_conflict\\_in\\_the\\_philippines.pdf](https://eprints.soas.ac.uk/4362/1/AJPS13-state_moro_conflict_in_the_philippines.pdf) (15/08/2017, 20.20), hal. 13.

<sup>53</sup> Al Haj Murad Ebrahim, *Will Peace Hold in Mindanao*, diakses dalam [http://www.isis.org.my/attachments/apr27/PS8b\\_Al\\_Haj\\_MURAD\\_Ebrahim.pdf](http://www.isis.org.my/attachments/apr27/PS8b_Al_Haj_MURAD_Ebrahim.pdf) (19/09/2017, 12.35) hal. 5.

Kemudian lahirnya BMLO yang dibentuk pada tahun 1971 dipimpin oleh Raschid Lucman.<sup>54</sup> Organisasi ini sama dengan MIM yakni bertujuan untuk memisahkan diri dari Filipina dan membentuk negara Islam di Mindanao. Kemudian ICC yang didirikan pada tahun 1996 dipimpin oleh Habib Mujahab Hashim dipandang sebagai penyeimbang penting kepemimpinan Nur Misuari.<sup>55</sup> ICC bertujuan untuk mewakili tuntutan maksimum asli dari MNLF, yakni pembentukan negara Bangsa Moro independen untuk menyertakan Mindanao, Sulu, dan juga Pahlawan.

Adapun beberapa kelompok berikutnya yang ikut dalam menegakkan keadilan ialah kelompok yang dibangun oleh Abu Sayyaf yang dikenal dengan Islam garis keras yang ada di Moro.<sup>56</sup> Kelompok yang didirikan Abu Sayyaf pada tahun 1996<sup>57</sup> mempunyai motif penyanderaan yang dilakukan adalah menteri dengan meminta tebusan bermilyar rupiah namun para sandera hanya untuk jaminan agar ditebus dengan uang yang diinginkannya. Organisasi ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam, dan mengubah strategi dari menyerang pasukan pemerintah menjadi menyandera warga sipil.

Perlawanan terhadap pemerintah Filipina sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok Moro, dimana kelompok tersebut juga menjadi sebuah perwakilan Moro

---

<sup>54</sup> Rizal G. Buendia, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>55</sup> Voltaire Tupaz, *MNLF to MILF: Good Luck But Beware*, diakses dalam <http://www.rappler.com/nation/14225-mnlf-to-milf-on-peace-deal-good-luck-but-beware> (19/09/2017, 13.18)

<sup>56</sup> Muhammad Asad Shahab, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>57</sup> Zachary Abuza, *The Demise of the Abu Sayyaf Group in the Southern Philippines*, diakses dalam <https://www.ctc.usma.edu/posts/the-demise-of-the-abu-sayyaf-group-in-the-southern-philippines> (20/10/2017, 07.06).

terhadap perundingan internasional, yakni *Moro International Liberation Front* dan *Moro Islamic Liberation Front*.<sup>58</sup> Sebuah struktur terpisah dari sistem politik yang ada untuk pengembangan masyarakat MNLF, integrasi pasukan MNLF ke dalam *the Armed Force of Philippines* atau *the Philippine National Police* dan penguatan institusi untuk "hak otonom pribadi", seperti pendidikan Islam dan hukum Syariah.<sup>59</sup> Adanya kehilangan kekuasaan bagi para penguasa Muslim (sultan) serta penegakkan syari'at Islam untuk masyarakat Muslim yang berada di Filipina.<sup>60</sup>

Upaya dari GRP untuk menemukan suatu penyelesaian yang damai, adil dan menyeluruh bagi Bangsa Moro di Filipina dengan melakukan dua sikap sekaligus, yakni konsiliasi dan pembangunan wilayah.<sup>61</sup> Pertama, Konsiliasi, yakni berbagai upaya damai, dialog-dialog terbuka dengan semua kelompok yang terlibat dalam pemberontakan dan membahas semua persoalan untuk sampai pada penyelesaian yang dapat diterima. Kedua, Pembangunan wilayah, melakukan pembangunan yang melibatkan semua sumber-sumber daya dalam penyediaan berbagai fasilitas ekonomi, sosial, kultural dan kebudayaan serta perluasan partisipasi penduduk dalam pembangunan tersebut.

---

<sup>58</sup> Alghi Mustika Luthfi, *Op., Cit.*, hal. 18.

<sup>59</sup> Rizal G. Buendia, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

<sup>60</sup> George C. Decasa, 1999, *The Qur'anic Concept of Umma and Its Function in Philippine Muslim Society*, Book Review, Indonesian Journal for Islam Studies, ISSN: 0215-0492, Studia Islamika: Vol. 6, No. 3, hal. 188.

<sup>61</sup> Saifullah SA, September 2008, *Umat Islam di Filipina Selatan*, Jurnal Islamica, Vol. 3, No. 1, hal. 64.



#### 2.1.4 Perjanjian Damai 1996

Selain itu pada tahun 1996, Perjanjian Perdamaian Jakarta (*Jakarta Peace Agreement*), proses peluncuran dalam Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR) untuk integrasi dari MNLF ke dalam arus utama politik Filipina dan kehidupan sipil.<sup>62</sup> Sehingga pada tahun 1996, dimana adanya perjanjian perdamaian dengan MNLF dan pemerintah Filipina, 1996 *Final Peace Agreement* (ditengahi oleh Indonesia melalui OKI) tidak pernah diimplementasikan karena konflik masih sering terjadi dan berkelanjutan di Moro, Filipina Selatan.

Konflik yang terjadi tidak hanya membuat sedikit pihak yang memperhatikan, tetapi juga banyak pihak. Perhatian dari banyak pihak tidak lagi tentang pihak penandatanganan perjanjian perdamaian, namun sebuah keinginan GRP agar dapat menerima sebagai strategi untuk perdamaian dan keadilan di Mindanao. Strategi untuk proses perdamaian sangatlah penting terutama untuk konflik yang telah berlangsung lama. Pada strategi ini hanya ada ketika konsensus nasional bahwa perjanjian perdamaian dapat diimplementasikan secara langsung membahas keluhan-keluhan bangsa Moro.

Adapun beberapa komponen yang harus diperkuat dalam suatu proses perdamaian.<sup>63</sup> Pertama, kedua belah pihak harus membangun konsensus nasional pada rencana yang telah disepakati selama negosiasi dengan melakukan lebih

---

<sup>62</sup> Lisa Huang, Victor Musembi and Ljiljana Petronic, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>63</sup> United State Institute of Peace, *The Mindanao Peace Talks: Another to Resolve the Moro Conflict in the Philipines*, Special Report: Washington, DC 20036, hal. 11, diakses dari <http://www.usip.org/sites/default/files/sr131.pdf> (30/04/2017, 18.54).

konsultasi pada isu-isu yang dibahas dalam negosiasi dan pemerintah harus menjangkau para pemimpin Kristen, khususnya anggota Kongres dan pejabat setempat. Kedua, Pemimpin agama Kristen dan Muslim harus memimpin dalam mengumpulkan pengikutnya untuk mendukung proses perdamaian. Uskup ataupun Ulama Forum, sebuah konferensi Kristen dan pemimpin agama Muslim di Filipina, harus terlibat aktif dalam memanfaatkan dukungan ini.

Kemudian yang ketiga, untuk GRP dan Moro, menyediakan mekanisme yang kuat dan efektif untuk pelaksanaan perjanjian perdamaian. Pihak ketiga yang netral harus ditunjuk untuk langsung mengawasi kepatuhan setia Manila dan Moro dengan ketentuan perjanjian. Terakhir keempat, pendanaan untuk implementasi harus diidentifikasi secara jelas dan dialokasikan dari kepentingan partisan dan pribadi dari setiap kelompok atau partai.

Setelah segala hal yang dilakukan GRP untuk melakukan perdamaian dengan Moro, upaya penyelesaian selanjutnya dari negara-negara atau non-negara seperti organisasi internasional juga ikut melibatkan diri dalam upaya tersebut. Bantuan yang diberikan juga tidak sedikit, seperti bahan pokok atau yang berbantuan dana juga disalurkan oleh negara-negara ataupun organisasi internasional.

## **2.2 Upaya Penyelesaian Konflik Moro di Filipina**

Proses negosiasi perdamaian yang disepakati dalam kerangka kerja dengan melibatkan komunitas internasional secara bertahap dapat menggantikan lingkaran sejarah perampasan, ketahanan, dan ketidakpercayaan di Mindanao menjadi dinamika

yang positif. Proses negosiasi yang disepakati pada tanggal 11 September 2001 menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di Moro, Filipina Selatan.<sup>64</sup>

Partisipasi negara lain dalam upaya penyelesaian konflik Moro mempunyai kontribusi yang signifikan.<sup>65</sup> Pada sub bab yang kedua ini hanya menjelaskan beberapa negara yang ikut terkait dan menonjol dalam penyelesaian konflik Moro, seperti Amerika Serikat (AS), Libya, PBB dan *World Bank*, Jepang, Malaysia, Indonesia serta OKI. Namun dalam sub bab ini hanya dijelaskan pada beberapa negara yang lebih dominan dan hampir bersamaan dengan negara lainnya dalam memediasi konflik. Sehingga kali ini dalam upaya penyelesaian konflik agar lebih mudah dipahami terbagi menjadi dua, yakni melalui negara dan organisasi internasional.

### **2.2.1 Keterlibatan Aktor Internasional dalam Konflik Moro di Filipina**

Amerika Serikat (AS) membantu penyelesaian konflik Moro dengan misi utamanya berasal dari keamanan pada terorisme dengan adanya hubungan sejarah dan perdagangan yang dalam dengan Filipina.<sup>66</sup> AS memainkan peran yang mendukung dalam proses perdamaian dan telah menyatakan minatnya untuk membantu dengan menawarkan bantuan pembangunan jika sebuah perjanjian perdamaian

---

<sup>64</sup> Salvatore Schiavo-Champo and Mary Judd, February 2005, *The Mindanao Conflict in The Philippines: Roots, Costs, and Potential Divided*, The World Bank, Social Development Papers: Conflict Prevention and Reconstruction, Paper No. 24, hal. 9. Diakses dari [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2005/03/28/000011823\\_20050328152733/Rendered/PDF/31822.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2005/03/28/000011823_20050328152733/Rendered/PDF/31822.pdf) (30/04/2017, 16.14).

<sup>65</sup> Ariel R. Caculitan, 2005, *Negotiating Peace with the Moro Liberation Front in the Southern Philippines*, Tesis, California: Master of Arts in Security Studies (Stabilization and Reconstruction), Naval Postgraduate School, hal. 87.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 75

ditandatangani. Kemudian, menjadi panduan bagi kekuatan penjaga perdamaian multinasional yang akan memberikan jaminan keamanan dan memastikan kepatuhan pemerintah Filipina dan Moro dalam tahap implementasi dari kesepakatan damai komprehensif di masa depan. Komitmennya untuk menyediakan sumber daya dan mengerahkan kekuatannya terlihat pada tahun 2002 selama latihan militer bilateral diberi nama Balikatan (yang berarti bahu ke bahu), ditujukan untuk menargetkan kelompok teroris Abu Sayyaf di Mindanao.<sup>67</sup> Dukungan yang diberikan AS tegas terhadap integritas teritorial Filipina meningkatkan prospek solusi politik konflik tersebut.

Kepentingan AS untuk penyelesaian konflik juga berdasarkan pada permintaan dari Filipina dan permohonan terpisah pada MILF di tahun 2003, sikap konsisten terhadap misi utama memberikan kesempatan untuk berdamai meskipun beberapa serangan bom pada tahun yang sama di kota-kota Mindanao.<sup>68</sup> AS merupakan negara yang sangat memerangi teroris sesuai dengan misi utamanya, sehingga jika berhubungan dengan Islam dan peperangan dianggap sebagai teroris. Namun persamaan diantara dua kelompok yang ada di Moro ialah sama-sama mengharapkan suatu keadilan bagi Moro untuk ada dalam GRP.

Kemudian datang dukungan dari negara lainnya yakni dari Libya, resolusi damai untuk konflik Moro dipandang signifikan, karena hubungan sejarah pada konflik dan pengaruh pada masyarakat Moro dimana Libya pernah menjadi

---

<sup>67</sup> Ariel R. Caculitan, *Op., Cit.*, hal, 75.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 76-77

pendukung yang kuat pada pemberontakan Moro di Filipina Selatan.<sup>69</sup> Pada tahun 1976, intensitas pertempuran berkurang setelah Presiden Marcos membuka hubungan diplomatik dengan Libya dan negara lain, Libya menjadi mediator utama dalam penandatanganan atas nama GRP dan MNLF, kedua pihak setuju untuk memberikan otonomi kepada 13 provinsi di Moro, dimana Kepentingan Libya dalam proses perdamaian sebagai sikap altruistik dan politik, karena tidak memiliki agenda ekonomi atau keamanan yang dikejar dengan GRP kecuali untuk kekuatan pekerja buruh.<sup>70</sup>

Libya juga ikut hadir dalam *the 1996 Final Peace Agreement* (FPA) dimana yang memimpin pertemuan ialah Indonesia. Kepentingan Libya dalam proses perdamaian mungkin dipertimbangkan secara murni sebagai sikap altruistik dan politis, karena tidak memiliki agenda ekonomi atau keamanan yang dikejar Filipina, kecuali untuk kekuatan pekerja buruh.<sup>71</sup>

Negara selanjutnya yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina ialah Malaysia, dimana partisipasi dari Malaysia hampir sama dengan Indonesia, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Malaysia mulai menjadi penengah dalam penyelesaian konflik pada tahun 2001, dimana pada saat itu Moro

---

<sup>69</sup> Government of the Philippines, *Philippines: The Good News – UN, European Community to Help Spur Development of Mindanao*, diakses pada <http://reliefweb.int/report/philippines/philippines-good-news-un-european-community-help-spur-development-mindanao> (25/08/2017, 22.17).

<sup>70</sup> Lisa Huang, Victor Musembi and Ljiljana Petronic, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>71</sup> Accord Mindanao: Profiles, 1999, *Compromising on Autonomy: Mindanao in Transition*. Diakses pada <http://www.c-r.org/accord-article/profiles-accord-mindanao-1999> (25/08/2017, 23.05), hal. 93.

dan GRP mendapatkan penengah setelah beberapa tahun silam.<sup>72</sup> Malaysia menjadi penengah tidak mengatasnamakan negara sendiri tetapi melalui *International Contact Group* (ICG). Keputusan untuk mengundang Malaysia sebagai mediator atau penengah dikarenakan dengan dua alasan. Pertama adalah Malaysia sebagai negara yang berpenduduk Muslim dengan budaya Islam yang jelas kemungkinan akan memperoleh kepercayaan dari Moro yang memiliki latar belakang agama dan budaya serupa sehingga dapat menjalin hubungan Moro lebih mudah, dan yang kedua ialah Malaysia juga mempunyai penduduk non-Muslim yang dapat menggambarkan contoh bahwa agama Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan agama lainnya.<sup>73</sup>

Pertarungan antara pasukan GRP dan Moro berkurang sejak 2003 setelah melakukan gencatan senjata secara bilateral untuk membuka jalan bagi perundingan perdamaian dengan formal. Keterlibatan Jepang dalam proses perdamaian konflik Moro juga ikut serta, yaitu dengan menyediakan bantuan 400 juta USD untuk mendukung perdamaian dan pengembangan Mindanao dan juga terdapat di sebuah pidato yang disampaikan oleh dewan majelis Moro pada Mei 2005, Taeko Takahashi seorang petinggi Jepang untuk Filipina menekankan perlunya perdamaian untuk pengembangan di Mindanao jika Moro tetap berada pada jalur damai.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Donna Isyrina Fitrah, 2012, *Multiparty Mediation in the Southern Philippines Conflict*, Tesis, Belanda: Master International Relations and Diplomacy, Leiden University, hal. 24

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 27

<sup>74</sup> Government of the Philippines, 31 May 2005, *Japan Pledges \$ 400 Million for Peace and Development in Mindanao*. Diakses pada <http://reliefweb.int/report/philippines/japan-pledges-400-million-peace-and-development-mindanao> (26/08/2017,10.07).

Adapun negara selanjutnya ialah Indonesia, dimana Indonesia tidak hanya mendapatkan peran tetapi juga identitas dalam menjadi penengah antara Filipina dan Moro. Namun yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya tersendiri karena berhubungan dengan judul yang penulis sedang teliti yakni berfokus pada Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina.

### **2.2.2 Keterlibatan Organisasi Internasional dalam Konflik Moro di Filipina**

Selain upaya penyelesaian konflik melalui negara-negara, upaya penyelesaian konflik Moro yang terjadi di Filipina juga mendapatkan bantuan dari organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *world bank*, serta Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak secara langsung terlibat dalam negosiasi perdamaian untuk konflik Moro, dimana proses negosiasi perdamaian memiliki kelanjutan yang difasilitasi Malaysia dan kelompok pendukung lain.<sup>75</sup> PBB secara aktif terlibat dalam mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi di Mindanao, dan membantu agar tercapainya perdamaian dan pengembangan melalui program multi-donor, hal tersebut sangat relevan dengan mempertimbangkan keamanan yang minim serta kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan bagi area yang terkena di Mindanao.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ariel R. Caculitan, *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 83

Pertisipasi *world bank* hanya terbatas pada aspek pengembangan ekonomi dalam proses perdamaian yang secara khusus dalam menghasilkan bantuan keuangan untuk mendukung adanya penyelesaian damai dengan program yang sama dengan PBB yakni *Multi-Donor Trust Fund* (MDTF) sebagai bantuan humaniter, rehabilitasi dan pengembangan area yang menjadi hancur karena perang di Mindanao.<sup>77</sup> PBB dan *world bank* menggunakan suatu program yang dapat membantu tercapainya perdamaian.

*International Contact Group* atau ICG merupakan organisasi yang juga ikut terlibat dalam penyelesaian konflik, namun ICG terlibat dengan perwakilan Malaysia hampir sama dengan Indonesia yang melalui OKI. ICG berbeda dengan OKI, masalah yang terjadi di Filipina Selatan telah berlangsung sejak lama kemudian mendapat perhatian dari OKI pada saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-3 OKI yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, tahun 1972.<sup>78</sup> Namun, karena di dalam OKI mempunyai anggota dari banyak negara kemudian OKI membentuk Komite atau pembentukan suatu panitia perdamaian untuk Filipina Selatan (OIC-PCSP). Komite yang dibentuk bukan semata-mata hanya sebuah panitia biasa tetapi di dalam komite tersebut terdapat beberapa negara yang menjadi ketua dan anggota.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 84

<sup>78</sup> Kementerian Luar Negeri, 27 Juni 2011, *Indonesia Kembali Menjadi Tuan Rumah Perundingan Implementasi Damai Pemerintah Filipina-MNLF*. Diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-kembali-menjadi-tuan-rumah-perundingan-implementasi-damai-Pemerintah-Filipina---MNLF.aspx> (05/04/2017, 21.50)



Beberapa upaya penyelesaian dari negara-negara maupun organisasi internasional yang telah diuraikan diatas kemudian disederhanakan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Upaya Penyelesaian Konflik Moro di Filipina**

<b>Aktor Internasional</b>		
<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Keterlibatan</b>
1.	Amerika Serikat	Berkomitmen menyediakan sumber daya dan mengerahkan kekuatannya terlihat pada tahun 2002 selama latihan militer bilateral.
2.	Libya	Menjadi mediator utama dalam penandatanganan atas nama GRP dan MNLF, kedua pihak setuju untuk memberikan otonomi pada 13 provinsi di Moro.
3.	Malaysia	Menjadi mediator dikarenakan dua alasan: 1) Sebagai negara yang berpenduduk Muslim dengan budaya Islam yang jelas kemungkinan akan memperoleh kepercayaan dari Moro yang memiliki latar belakang agama dan budaya serupa sehingga menjalin hubungan Moro menjadi lebih mudah. 2) Malaysia juga mempunyai penduduk non-Muslim yang dapat menggambarkan contoh bahwa agama Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan agama lainnya.
4.	Jepang	Menyediakan bantuan dana 400 USD untuk mendukung perdamaian dan pengembangan Mindanao. Menekankan perlunya perdamaian untuk pengembangan di Mindanao jika Moro tetap berada di jalur damai.
5.	Indonesia	Menjadi penengah dalam penyelesaian konflik 1996 atau <i>the 1996 FPA</i> dengan Libya. Kemudian berlanjut pada tahun 2001-2013, dimana pada tahun tersebut Indonesia melakukan perannya sebagai ketua komite dan di tahun 2013 Moro mendapatkan keadilan di Filipina.
<b>Organisasi Internasional</b>		
<b>No.</b>	<b>Organisasi Internasional</b>	<b>Keterlibatan</b>

1.	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	Membantu agar tercapainya perdamaian dan pengembangan melalui program multi-donor, mempertimbangkan keamanan yang minim serta kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan bagi area yang terkena konflik di Mindanao.
2.	<i>World Bank</i>	Membantu melalui program yang sama dengan PBB, <i>Multi-Donor Trust Fund</i> (MDTF) sebagai bantuan humaniter, rehabilitasi dan pengembangan area yang hancur karena perang di Mindanao.
3.	<i>International Contact Group</i> (ICG)	ICG terlibat dikarenakan Malaysia yang ikut terlibat, karena Malaysia juga menjadi penengah melalui ICG.
4.	Organisasi Konferensi Islam (OKI)	Pembentukan suatu panitia komite yakni panitia perdamaian untuk Filipina Selatan (OIC-PCSP) yang diketuai oleh Indonesia.

